

V. SIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan terkait Pengaruh Aspek Sosial, Ekonomi, dan Ekologi Terhadap Pembangunan Desa di Indonesia: *Multivariate Analysis* dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Aspek sosial yaitu pendidikan, akses sanitasi dan akses internet berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Desa Membangun, sedangkan kesehatan tidak berpengaruh terhadap Indeks Desa Membangun di Indonesia.
2. Aspek ekonomi yaitu jasa keuangan dan asuransi berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Desa Membangun, sementara infrastruktur jalan berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Desa Membangun di Indonesia.
3. Aspek ekologi yaitu kualitas udara tidak berpengaruh terhadap Indeks Desa Membangun, sementara risiko bencana berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Desa Membangun di Indonesia.
4. Dalam aspek sosial variabel pendidikan merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap Indeks Desa Membangun di Indonesia.
5. Dalam aspek ekonomi variabel jasa keuangan dan asuransi merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap Indeks Desa Membangun di Indonesia.

6. Dalam aspek ekologi variabel risiko bencana merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap Indeks Desa Membangun di Indonesia.
7. Pengelompokan wilayah terdiri dari 5 klaster dan terdapat perbedaan karakteristik serta perubahan wilayah dari setiap klaster pada tahun 2021 dan 2023. Pada tahun 2021 pengelompokan provinsi mendominasi pada klaster 2 dan pada tahun 2023 mendominasi pada klaster 1.
8. Berdasarkan perbandingan antar klaster terjadi penurunan nilai indikator yaitu pada tahun 2021 merupakan indikator yang unggul sedangkan pada tahun 2023 menjadi indikator yang lemah pada klasternya. Indikator yang dimaksud adalah klaster 1 infrastruktur jalan, klaster 2 akses sanitasi, klaster 3 akses internet, klaster 4 akses internet dan risiko bencana, klaster 5 pendidikan dan risiko bencana.
9. Berdasarkan wilayahnya terjadi perubahan pengelompokan wilayah pada klaster yaitu pada tahun 2021 termasuk klaster 2 (Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Bengkulu, Sulawesi Barat, Kep. Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Utara, DI Yogyakarta, Bali dan Sulawesi Selatan) dan klaster 5 (Nusa Tenggara Barat, Maluku dan Maluku Utara) mengalami transformasi menjadi klaster 1 pada tahun 2023 yang menunjukkan perubahan klaster yang mengarah lebih baik.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian maka implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dan pusat perlu meningkatkan jumlah sekolah menengah di wilayah perdesaan, terutama di desa dengan IDM yang masih rendah pada wilayah klaster 5.
2. Pemerintah daerah atau desa perlu meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana sanitasi seperti jamban sehat dan saluran pembuangan yang layak, terutama pada daerah perdesaan di wilayah klaster 2.
3. Pemerintah daerah dan pusat perlu memperluas jaringan internet hingga ke wilayah desa-desa terpencil. Pemerintah daerah pada wilayah klaster 3 dan 4 perlu meningkatkan akses terhadap teknologi informasi melalui pembangunan infrastruktur telekomunikasi.
4. Pemerintah daerah dan pusat mendorong pembukaan unit layanan perbankan/lembaga keuangan mikro di desa seperti BUMDesa Mitra Bank, koperasi simpan pinjam dan agen bank.
5. Pemerintah daerah dan pusat perlu melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas jalan agar memudahkan akses transportasi antar wilayah. Pemerintah daerah pada wilayah klaster 1 perlu mengevaluasi program pembangunan dan infrastruktur jalan, prioritaskan pembangunan dan perbaikan jalan desa yang rusak.

6. Pemerintah daerah dan pusat perlu meningkatkan upaya antisipasi atau mitigasi bencana alam, dapat melalui pemasangan alat deteksi dini bencana pada wilayah dengan risiko tinggi terhadap bencana.

C. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak mempertimbangkan kebijakan pemekaran wilayah sebanyak 3 provinsi baru yaitu Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan, serta provinsi Papua Barat juga mengalami pemekaran wilayah sebanyak 1 provinsi baru yaitu Papua Barat Daya, sehingga pada tahun penelitian karena terjadi pemekaran wilayah data yang tersedia belum lengkap. Data IDM provinsi DKI Jakarta tidak tersedia karena secara administratif seluruh wilayahnya berstatus kelurahan bukan desa dan IDM tidak diterapkan untuk kelurahan. Oleh karenanya provinsi-provinsi ini tidak masuk dalam penelitian.